ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan jabatannya menemukan berbagai macam permasalahan salah satu adalah pemalsuan akta yang dilakukan oleh karyawan Notaris. Pemalsuan akta autentik dibuat untuk menimbulkan atau menghapus suatu hak tertentu. Pemalsuan ini biasanya dilakukan oleh oknum karyawan Notaris yang telah lama bekerja atau diberikan kepercayaan untuk menangani akta autentik. Pemalsuan akta autentik oleh oknum karyawan Notaris merupakan salah satu peristiwa yang menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan akta autentik.

Perumusan masalahnya yaitu (1) Bagaimana akibat hukum akta autentik yang dipalsukan oleh karyawan Notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris yang akta autentik dipalsukan oleh karyawan Notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan secara induktif dan disajikan dalam penulisan hukum.

Hasil dari penelitian Akta autentik yang dipalsukan oleh karyawan Notaris mengakibatkan dapat dibatalkan melalui gugatan. Karyawan notaris dapat dikenai pasal Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Notaris dapat dilaporkan dan dikenai sanksi administratif berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Daerah. Perlindungan hukum bagi Notaris yang akta autentik dipalsukan oleh karyawan Notaris dapat dilakukan mediasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan beserta penyerahan bukti-bukti yang menyatakan bahwa pemalsuan tersebut dilakukan oleh karyawan Notaris.

Saran dari penulis adalah diharapkan Notaris juga memberikan pendekatan secara kekeluargaan agar dapat mengenal karyawannya lebih jauh, dan melakukan penyeleksian dengan ketat saat penerimaan karyawan Notaris. Notaris diharapkan dapat mengedukasi para karyawan terkait ketentuan-ketentuan serta peraturan perundang-undang guna meminimalisir dan melakukan antisipasi apabila karyawan notaris melakukan pemalsuan seperti CCTV.

Kata kunci: Notaris, Pemalsuan Akta, Karyawan Notaris

ABSTRAC

Notaries carrying out their positions will certainly encounter various kinds of problems, one of which is forgery of deeds committed by Notary employees. Forgery of authentic deeds is made to create or eliminate certain rights. This forgery is usually carried out by unscrupulous Notary employees who have worked for a long time or are entrusted with handling authentic deeds. Forgery of authentic deeds carried out by unscrupulous Notary employees is one of the incidents that has become a matter of debate. This is due to several factors and incentives that influence the occurrence of fake authentic deeds.

The formulation of the problem is (1) What are the legal consequences of authentic deeds forged by Notary employees according to the applicable laws and regulations? (2) What is the legal protection for Notaries whose authentic deeds are forged by Notary employees according to applicable laws and regulations?

The approach method used in this research is an empirical juridical approach. The source and type of data used in this research uses primary data in the form of interviews and secondary data. This research uses qualitative data analysis and from the results of the data analysis that has been collected, conclusions are drawn inductively and presented in legal writing.

The results of this research can be concluded that an authentic deed that is forged by a Notary employee can result in it being canceled through a lawsuit. Notary employees may be subject to Article 264 Paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code. Notaries can be reported and subject to administrative sanctions based on the decision of the Regional Supervisory Council. Legal protection for Notaries whose authentic deeds are forged by Notary employees can involve mediation or filing a lawsuit in court along with the submission of evidence stating that the forgery was carried out by Notary employees.

The author's advice is that it is hoped that Notaries will also provide a family approach so that they can get to know their employees better, and carry out strict selection when accepting Notary employees. Notaries are expected to be able to educate employees regarding the provisions and regulations of the law in order to minimize and anticipate if notary employees commit forgery such as CCTV.

Keywords: Notary, Authentic Deed Forgery, Notary Employees